





NOMOR: 564/ISB/KAPRODITI/EX08/2025 NOMOR: 71/145/U/PEMDES.CK/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 1.

: Candra Gudiato, S.Kom., M.Kom.

Jabatan

: Kepala Program Studi Teknologi Informasi

Alamat

: Jl. Bukit Karmel No 1, Sebopet, Bengkayang, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Informasi Institut Shanti Bhuana, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: Benyamin Kalvin

Jabatan

: Kepala Desa

Alamat

Bengkayang-Singkawang, Dusun : Jln Raya

Rt/Rw.002/001 Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung

Kabupaten Bengkayang. Kode Pos 79211

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cipta Karya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan di bidang (2)pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kesepakatan Para Pihak.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penerapan teknologi yang tepat (3)
- Melakukan penelitian berkaitan dengan pengembangan teknologi sesuai potensi desa (4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat desa melalui program pelatihan teknologi.

Se &

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan
 - (a) Mendukung pelaksanaan pendidikan yang ada di lingkungan Institut Shanti Bhuana melalui kegiatan magang atau kerja praktik/skripsi mahasiswa.
- (2) Bidang Penelitian
 - (a) Memberikan akses kepada para dosen untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui penelitian.
 - (b) Pengembangan dan peningkatan publikasi hasil kajian dan kolaborasi antar pihak.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - (a) Memberikan pendampingan untuk mengembangkan kompetensi melalui program pengabdian kepada masyarakat.
 - (b) Melaksanakan pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi dan komunikasi untuk mendukung tranformasi Desa Digital

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - (a) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan pendidikan, pengabdian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - (b) PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga pengajar dan sumber daya untuk pelatihan
 - (c) PIHAK PERTAMA mengorganisir kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - (a) PIHAK KEDUA berhak menerima laporan dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - (b) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bantuan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA.
 - (c) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas dan dukungan logistik untuk pelatihan dan kegiatan.
 - (d) PIHAK KEDUA mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang relevan dengan program yang akan dilaksanakan.
 - (e) PIHAK KEDUA mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan.

le &

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia akan di tentukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan di tuangkan dalan Implementation of Arrangement (IA).

Pasal 5 JANGKA WAKTU **PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6 **FORCE MAJEURE**

- Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban (1) melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- Apabila terjadi force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

Pasal 7 **BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur tersendiri dalam Implementation of Arrangement sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 **PENUTUP**

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dan (1) dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Bengkayang, 5 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA

Kepala Program Studi Teknologi Informasi Institut Shanti Bhuana

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Cipta Karya

Benyamin Kalvin

Candra Gudiato, S.Kom., M.Kom.